

## PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) MELALUI PENDAMPINGAN PARTISIPATIF DAN BERBASIS TRANSPARANSI DI DESA SELEBUNG, KECAMATAN BATUKLIANG, KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Muh. Rizal Hamdi<sup>1\*</sup>, Andi Muhammad Fu'ad<sup>2</sup>, Naili Azizah<sup>3</sup>, Fauzi Hadi Lukita<sup>4</sup>, Ahmad Junaidi<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Lombok Barat, Indonesia

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Kudus, Kudus, Indonesia

<sup>4</sup> Institut Teknologi Amanna Gappa, Makassar, Indonesia

<sup>5</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Samarinda, Indonesia

\*email ([muhammadrizalhamdi.stisda@gmail.com](mailto:muhammadrizalhamdi.stisda@gmail.com))

**Abstrak:** Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan desa yang membutuhkan kapasitas aparatur desa yang mumpuni serta keterlibatan masyarakat secara partisipatif. Namun, dalam praktiknya, masih banyak aparatur desa yang menghadapi kendala dalam menyusun RKPDES secara sistematis, transparan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Permasalahan ini berpotensi menghambat efektivitas pembangunan desa serta akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun RKPDES melalui pendampingan partisipatif dan berbasis transparansi. Metode yang digunakan meliputi pelatihan, pendampingan teknis, serta simulasi penyusunan RKPDES dengan pendekatan partisipatif. Kegiatan ini juga menekankan aspek transparansi guna memastikan bahwa proses perencanaan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam menyusun RKPDES secara lebih sistematis dan berbasis data. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan juga meningkat, yang berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan dampak positif bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan partisipatif.

**Kata Kunci:** Rencana Kerja, Aparatur Desa, Pendampingan Partisipatif, Transparansi, Tata Kelola Desa

**Abstract:** The preparation of the Village Government Work Plan is an important stage in village development planning that requires the capacity of village officials and participatory community involvement. However, in practice, many village officials still face obstacles in preparing the Village Government Work Plan in a systematic, transparent, and community participation-based manner. This problem has the potential to hamper the effectiveness of village development and the accountability of village budget utilisation. This community service aims to increase the capacity of the Selebung Village apparatus, Batukliang District, Central Lombok Regency in preparing it through participatory and transparency-based assistance. The methods used include training, technical assistance, and simulation of Village Government Work Plan preparation with a participatory approach. This activity also emphasises aspects of transparency to ensure that the planning process runs according to the principles of public accountability. The results of the service showed an increase in the understanding and skills of village officials in preparing Village Government Work Plan in a more systematic and data-based manner. In addition, community involvement in the planning process also increased, which contributed to increased transparency and accountability in the management of village funds. Thus, this activity has a positive impact on strengthening more effective and participatory village governance.

**Keywords:** Work Plan, Village Apparatus, Participatory Assistance, Transparency, Village Governance

<b>Article history:</b> Received : 01/07/2021 Approved : 01/07/2021	<b>STIS Darussalam Bermi</b> <a href="https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jp">https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jp</a> <a href="#">m</a>
---	--

## Pendahuluan

Perencanaan pembangunan desa merupakan elemen kunci dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) berperan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya, banyak desa masih menghadapi kendala dalam penyusunan RKPDES yang partisipatif dan transparan. Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, adalah salah satu contoh desa yang mengalami tantangan dalam penyusunan RKPDES yang efektif. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa aparatur desa masih kurang memahami teknik penyusunan RKPDES yang sistematis, berbasis data, dan sesuai dengan prinsip transparansi serta partisipasi masyarakat.

Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam kapasitas aparatur desa dalam mengelola proses perencanaan yang inklusif dan akuntabel. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perencanaan pembangunan desa harus melibatkan masyarakat secara aktif dan mempertimbangkan prinsip transparansi untuk mencegah penyalahgunaan anggaran (Suharto, 2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pendampingan yang berbasis partisipasi dan transparansi guna memastikan bahwa RKPDES dapat disusun dengan lebih baik.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perencanaan pembangunan desa, namun belum secara mendalam mengkaji aspek peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan RKPDES melalui pendekatan partisipatif dan berbasis transparansi. Misalnya, penelitian oleh Prasetyo (2019) menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan desa, tetapi belum membahas secara spesifik metode pendampingan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa. Sementara itu, studi oleh Rahayu (2021) menunjukkan bahwa transparansi dalam perencanaan desa dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa, namun tidak menjelaskan strategi implementasi transparansi tersebut dalam proses penyusunan RKPDES. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada kajian mengenai perencanaan desa, masih minim penelitian yang berfokus pada metode pendampingan partisipatif dan transparansi bagi aparatur desa dalam menyusun RKPDES. Oleh karena itu, penelitian berbasis pengabdian ini memiliki nilai kebaruan dalam memberikan solusi bagi desa-desa yang menghadapi tantangan serupa, khususnya di Desa Selebung.

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu; (1) Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun RKPDES yang berbasis partisipatif dan transparansi. (2) Memberikan pendampingan kepada aparatur desa dalam memahami prinsip-prinsip perencanaan desa yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat. (3) Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan RKPDES agar dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat Desa Selebung. (4) Mengembangkan model pendampingan yang dapat direplikasi di desa lain dalam meningkatkan efektivitas

perencanaan pembangunan desa. Dengan pendekatan ini, diharapkan aparatur desa dapat menyusun RKPDES yang lebih berkualitas, transparan, dan partisipatif, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

## **Metode**

Metode yang digunakan dalam program pengabdian ini adalah *Participatory Action Research* (PAR) dan Pendampingan Partisipatif Berbasis Transparansi. Metode PAR dipilih karena melibatkan partisipasi aktif aparatur desa dan masyarakat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES). Pendampingan partisipatif berbasis transparansi digunakan untuk memastikan bahwa proses perencanaan bersifat inklusif, akuntabel, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Sasaran utama program ini adalah aparatur desa di Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, yang terdiri dari:

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Tim Penyusun RKPDES
4. Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Kelompok Masyarakat

Pelaksanaan program ini terdiri dari beberapa tahapan utama:

1. Tahap Identifikasi dan Pemahaman Masalah yang terdiri dari:
  - a. Observasi awal terhadap kondisi penyusunan RKPDES di Desa Selebung.
  - b. Diskusi awal dengan aparatur desa dan masyarakat untuk memahami permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan desa.
  - c. Pengumpulan data sekunder terkait perencanaan pembangunan desa sebelumnya.
2. Tahap Pelatihan dan Pendampingan
  - a. Pelatihan mengenai prinsip-prinsip perencanaan desa yang partisipatif dan transparan.
  - b. Pendampingan teknis dalam penyusunan RKPDES berbasis data dan kebutuhan masyarakat.
  - c. Simulasi dan praktik langsung penyusunan RKPDES yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
3. Tahap Implementasi dan Monitoring
  - a. Penyusunan draft RKPDES oleh tim desa dengan bimbingan fasilitator.
  - b. Forum konsultasi dan validasi dengan masyarakat untuk memastikan keterwakilan dan transparansi.

- c. Evaluasi proses penyusunan RKPDES, dengan menilai efektivitas pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu:

1. Teknik Pengumpulan Data
  - a. Wawancara mendalam dengan aparatur desa dan masyarakat.
  - b. Diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) untuk menggali aspirasi masyarakat.
  - c. Kuesioner untuk mengukur pemahaman aparatur desa sebelum dan sesudah pelatihan.
  - d. Observasi langsung dalam penyusunan RKPDES.
2. Teknik Analisis Data
  - a. Analisis deskriptif untuk mengevaluasi perubahan kapasitas aparatur desa.
  - b. Analisis komparatif antara kondisi sebelum dan sesudah pelatihan dan pendampingan.
  - c. Evaluasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDES berdasarkan indikator transparansi dan inklusivitas.

Metode ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun RKPDES yang berbasis partisipasi dan transparansi, sehingga pembangunan desa lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

## Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) melalui pendekatan pendampingan partisipatif dan berbasis transparansi. Hasil temuan utama yang diperoleh dalam program ini mencakup:

- 1. Peningkatan Pemahaman Aparatur Desa tentang RKPDES**
  - a. Sebelum program dimulai, tingkat pemahaman aparatur desa mengenai penyusunan RKPDES masih terbatas, dengan hanya 35% dari total peserta yang memahami secara mendalam tahapan penyusunan RKPDES.
  - b. Setelah dilakukan pendampingan partisipatif, pemahaman mereka meningkat signifikan menjadi 85% (Tabel 1).
- 2. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKPDES**

- a. Sebelum pendampingan, hanya 25% masyarakat yang terlibat dalam proses penyusunan RKPDES.
- b. Setelah program berjalan, keterlibatan masyarakat meningkat hingga 75%, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah partisipasi dalam musyawarah desa.

### 3. Peningkatan Transparansi dalam Penyusunan RKPDES

- a. Sebelum program, hanya 40% masyarakat yang merasa bahwa penyusunan RKPDES dilakukan secara transparan.
- b. Pasca pendampingan, 80% masyarakat mengakui adanya transparansi dalam penyusunan RKPDES, terutama setelah penerapan sistem informasi desa berbasis daring.

Dengan adanya pelatihan dan pendampingan, proses penyusunan RKPDES yang sebelumnya memakan waktu rata-rata 3 bulan, kini dapat diselesaikan dalam 1,5 bulan dengan kualitas perencanaan yang lebih baik.

**Tabel 1.** Efektivitas Penyusunan RKPDES

Aspek Evaluasi	Sebelum Pendampingan (%)	Setelah Pendampingan (%)
Pemahaman tentang RKPDES	35	85
Keterlibatan Masyarakat	25	75
Transparansi Proses	40	80
Efektivitas Waktu	3 bulan	1,5 bulan

Peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap RKPDES menunjukkan efektivitas pendekatan pendampingan partisipatif. Menurut teori perencanaan partisipatif (Arnstein, 1969), semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam suatu perencanaan, maka semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini terbukti dari hasil temuan yang menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa dan keterlibatan masyarakat. Selain itu, transparansi dalam penyusunan RKPDES juga mengalami perbaikan signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra et al. (2020), yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi desa berbasis digital mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan desa. Dengan meningkatnya transparansi, terjadi pergeseran pola pikir

aparatur desa dari yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi lebih inklusif dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat.

Dampak dari hasil pengabdian ini juga dapat dilihat dalam perubahan perilaku aparatur desa dalam menyusun RKPDES. Sebelum program ini dilaksanakan, penyusunan RKPDES sering kali dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat. Namun, setelah pendampingan, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Hal ini membuktikan bahwa tujuan program pengabdian telah tercapai dengan baik, yaitu menciptakan sistem penyusunan RKPDES yang lebih partisipatif dan transparan.

Dengan demikian, hasil pengabdian ini secara nyata telah mampu mengatasi permasalahan utama dalam penyusunan RKPDES di Desa Selebung, yaitu kurangnya pemahaman aparatur desa, minimnya keterlibatan masyarakat, serta rendahnya tingkat transparansi. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan perubahan pola pikir aparatur desa serta masyarakat, diharapkan perencanaan pembangunan desa ke depan akan lebih efektif, inklusif, dan akuntabel.



**Gambar 1.** Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Penyusunan RKPDES

### **Kesimpulan**

Program pengabdian ini berhasil meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) melalui pendekatan pendampingan partisipatif dan berbasis transparansi. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa dengan metode ini, aparatur desa lebih memahami prinsip-prinsip perencanaan yang inklusif, berbasis data, serta akuntabel. Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran dan keterampilan dalam menyusun RKPDES yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi yang berlaku. Pendekatan partisipatif yang diterapkan memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam memberikan masukan, sehingga rencana kerja yang disusun lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan lokal. Transparansi dalam proses penyusunan juga mendorong peningkatan akuntabilitas pemerintah desa, yang berkontribusi pada kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pembangunan desa.

Untuk keberlanjutan program, diperlukan pendampingan lanjutan bagi aparatur desa

guna memperdalam pemahaman dan keterampilan dalam implementasi RKPDES yang telah disusun. Selain itu, perlu adanya penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis partisipasi masyarakat agar efektivitas pelaksanaan RKPDES dapat terukur dengan baik. Kolaborasi dengan pihak akademisi, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil juga dapat diperluas untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan. Selain itu, pengembangan platform digital untuk transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan desa dapat menjadi langkah inovatif guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan terbuka.

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah beserta jajaran pemerintah Desa Selebung yang telah meluangkan waktu dan bekerjasama sehingga program pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar. ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi yang telah memberikan bantuan pendanaan untuk terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

### **Referensi**

- Vestikowati, E., Endah, K., & Hidayat, E. S. (2020). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. *Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Arma, N. A., Sopang, J., & Jaffisa, T. (2020). Peningkatan Aparatur Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kota Rantang. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Setiadi, S., Ekawati, H., & Habib, F. (2020). Pelatihan dan Pendampingan bagi Peningkatan Kapasitas Aparat dan Institusi Desa dalam Perencanaan dan Implementasi Pembangunan. *Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1).
- Suyanto. (2023). Pemberdayaan Aparat Pemerintahan Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Batoboh*, 8(2),
- Wardana, D., & Zainal. (2021). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(2),
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa